

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Kabupaten Kepulauan Anambas termasuk daerah yang melakukan pemantauan dan perhitungan Indeks Perkembangan Harga (IPH). IPH adalah indeks yang mencatat pertumbuhan positif/negatif serta menganalisis komoditas penyumbang andil fluktuasi pada waktu dan kondisi tertentu secara berkala. Meskipun Kabupaten Kepulauan Anambas termasuk daerah Non-IHK, namun Pemerintah Daerah tetap melaksanakan kewajiban dalam pelaksanaan tugas TPID yang tertuang dalam peraturan perundangan berlaku.

Mengacu pada program dan panduan pusat tentang Pengendalian Inflasi, setiap Pemerintah Daerah wajib berfokus pada sisi penguatan data dan realibilitas program, berfokus kepada program yang sinergis dengan Visi dan 8 Misi “Asta Cita” serta bersinkronisasi dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih Anambas 2025-2030 khususnya pada program Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan serta Memperkuat Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim dan Pariwisata.

Sasaran Fluktuasi Bapok Kabupaten Kepulauan Anamabs Tahun 2025, 2026, dan 2027 adalah $1,5 \pm 0,5\%$. Mengacu pada Tema Peta Jalan Nasional “Akselerasi Perbaikan Struktural dengan Mendorong Adopsi Digital untuk Stabilisasi Inflasi dan Pemulihan Ekonomi Menuju Indonesia Baru”, serta Berfokus pada 4 Kunci Stretegis (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif)

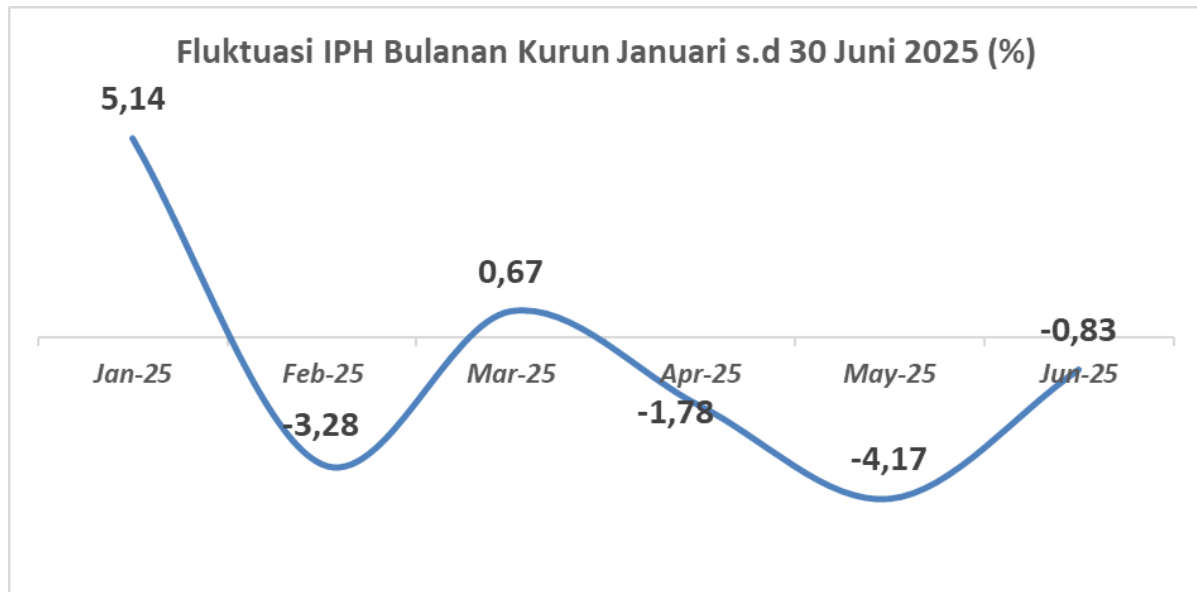
Perhitungan IPH Kabupaten Kepulauan Anambas atas 17 komoditas pangan bahan pokok dan penting (Bapokting) Kabupaten Kepulauan Anambas dilakukan dengan beberapa pendekatan perhitungan pertumbuhan. Pendekatan ini digunakan untuk melihat pertumbuhan dalam periode tertentu serta periodikal. Pendekatan perhitungan ini juga bertujuan untuk memudahkan dalam pencatatan dan pelaporan pelaksanaan tugas yang lebih optimal. Perhitungan pertumbuhan IPH yang digunakan di Anambas yaitu perhitungan secara *month to month (m-t-m)*, *year to date (y-t-d)*, dan *year on year (y-o-y)*

Berikut ini merupakan daftar 17 Bahan Pangan yang menjadi sasaran pantau dan fluktuatif untuk pergerakan IPH di Kepulauan Anambas, diantaranya :

(Sumber data: <http://inbok.disperindag.kepriprov.go.id/>)

Beras Medium	Daging Ayam Broiler
Beras Premium	Telur Ayam Broiler
Gula Pasir	Cabe Merah Keriting
Minyak Kita	Cabe Rawit
Minyak Goreng Curah	Bawang Merah Jawa
Minyak Kemasan Sederhana	Bawang Putih
Tepung	Kedelai
Daging Sapi Murni	Jagung
Daging Sapi Impor (Beku)	

Grafik 1. Fluktuasi 17 Bahan Pangan 6 Bulan Terakhir Kurun Januari 2025 s.d 30 Juni 2025 di Anambas (%)



Fluktuasi IPH secara *m-t-m* pada triwulan II 2025 berturut-turut mengalami fluktuasi negatif (minus). Berikut data komoditas penyumbang andil fluktuasi negatif di triwulan II Tahun 2025:

Fluktuasi *mtm* April sebesar (-1,78%), dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas:

1. Daging Sapi Beku Impor (17,39%) atau naik dari 115.000/kg ke 135.000/kg;
2. Cabe Merah Keriting (11,11%) atau naik dari 90.000/kg ke 100.000/kg;
3. Bawang Putih (-4,44%), atau turun dari 45.000/kg ke 43.000/kg;
4. Gula Pasir (-15,79%), atau turun dari 19.000/kg ke 16.000/kg;
5. Cabe Rawit (-38,46%), atau turun dari 130.000/kg ke 80.000/kg.

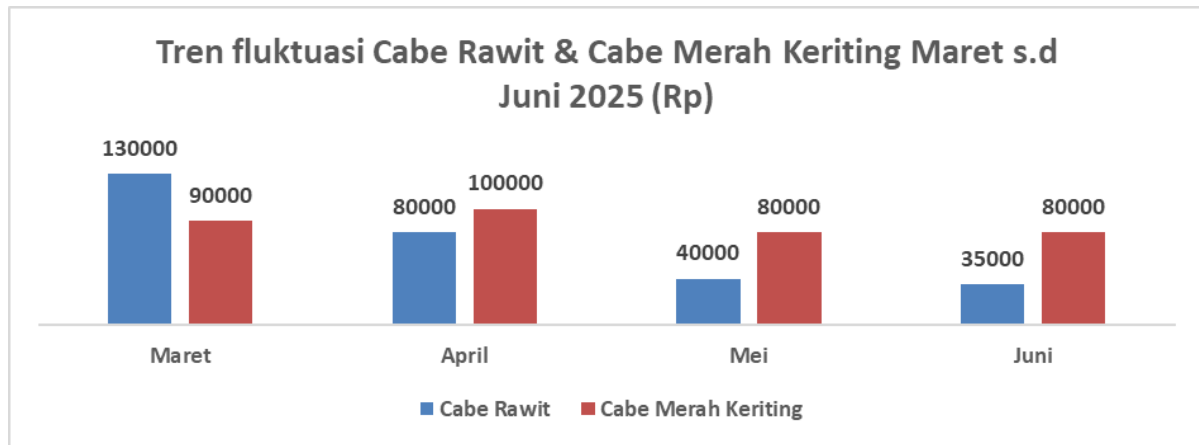
Fluktuasi *mtm* Mei sebesar (-4,17%), dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas:

1. Gula Pasir (12,50%), atau naik dari 16.000/kg ke 18.000.kg;
2. Cabe Rawit (-50,00%), atau turun dari 80.000/kg ke 40.000/kg;
3. Cabe Merah Keriting (-20,00%), atau turun dari 100.000/kg ke 80.000/kg;
4. Daging Sapi Beku Impor (-11,11%), atau turun dari 135.000/kg ke 120.000/kg;
5. Bawang Putih (-2,33%), atau turun dari 43.000/kg ke 42.000/kg.

Fluktuasi *mtm* Juni sebesar (-0,83%), dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas:

1. Daging Sapi Beku Impor (8,33%), atau naik dari 120.000/kg ke 130.000/kg;
2. Bawang Merah Jawa (-10,00%), atau turun dari 50.000/kg ke 45.000/kg;
3. Cabe Rawit (-12,50%), atau turun dari 40.000/kg ke 35.000/kg.

Grafik 2. Tren Harga Cabe di Anambas



Perkembangan IPH secara *year to date* (y-t-d) antara 31 Januari dengan 30 Juni 2025 sebesar (sebesar -5,76%), perkembangan IPH secara *year-on year* (y-o-y) 30 Juni 2025 terhadap 30 Juni 2024 adalah (sebesar 5,74%), dan Rata-rata IPH Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar (-2,26%).

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Letak Geografis

Kepulauan Anambas merupakan daerah kepulauan dengan cakupan $\pm 98\%$ terdiri dari perairan dan hanya $\pm 2\%$ daratan, terdiri dari 255 pulau yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan data moda transportasi laut yang berlayar di perairan Anambas dari Instansi Syahbandar Tarempa tahun lalu, Kepulauan Anambas masih melakukan distribusi logistik dari daerah/kota luar ($\pm 90\%$ dari kabupaten/kota terdekat).

Anambas bukan merupakan daerah surplus bahan pokok dan barang penting, khususnya pada komoditas kebutuhan-kebutuhan pokok (sembako). Pada sektor ketahanan pangan, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan masih menemukan kendala aktual di lapangan, minat masyarakat Anambas akan bertani dan bercocok tanam dinilai sangat kurang. Hal ini bisa dilihat dari perspektif sosial budaya yang ditunjukkan dengan kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat Anambas bermukim dan tinggal di daerah pesisir dan sebagian besar masyarakat Anambas bermata pencaharian sebagai nelayan. Kondisi cuaca ekstrim juga memberikan dampak negatif terhadap hasil produksi pertanian lokal.

2. Sarana Prasarana

Sarana dan Prasarana penunjang distribusi masih tergolong belum memadai, hal ini disebabkan karena sistem bongkar muat barang (*dwelling time*) terbesar di Pusat Kota Tarempa masih belum terurai dengan baik. Pada Kondisi-kondisi tertentu seperti cuaca buruk, masalah teknis dan keterlambatan kapal dapat berpotensi memberikan efek domino pada aktifitas bongkar muat di pelabuhan. Waktu tunggu aktifitas bongkar muat rata-rata memakan waktu mencapai 14 hari kalender. Penyebab utama lamanya waktu bongkar muat ini disebabkan karena:

1. Keterbatasan Tenaga kerja Bongkar Muat;
2. Di Lokasi Pelabuhan Tarempa masih belum memiliki sarana pergudangan;

- Jalur Distribusi dalam kota yang sangat sempit dan memakan waktu lama untuk bongkar muat dengan volume sekitar 1m^3 (menggunakan moda transportasi kendaraan Roda 3);
4. Belum dimanfaatkannya Gudang logistik sebagai sarana untuk memperlancar distribusi; dan

Belum selesainya Pembangunan Pelabuhan Gudang Logistik Teluk Ret.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Penyusunan rencana penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah;
2. Melakukan kegiatan pemantauan harga dan stok;
3. Meningkatkan Capaian Akumulasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD);
4. Meningkatkan jumlah mitra Rumah Pangan Kita (Bulog);
5. Mendorong jumlah pertumbuhan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan);
6. Peningkatan Infrastruktur dan Tata Kelola Kepelabuhanan Milik Pemda;
7. Penetapan Tarif Penyimpanan Barang di Area Terbuka Non-SRG);
8. Mempercepat Operasional Gudang Logistik;
9. Melaksanakan arahan Pusat melalui rakorda/rakorpusta dalam rangka penanganan inflasi daerah.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Melakukan Pendataan Stok dan Harga secara komprehensif;
2. Meningkatkan kualitas pelaporan pelaksanaan tugas TPID;
3. Mendorong pembentukan Mitra RPK melalui BULOG;
4. Mendorong percepatan Pembangunan infrastruktur kepelabuhanan di Teluk Ret melalui kajian yang komprehensif agar operasional Gudang Logistik dapat terelisasi pada Tahun 2026;
5. Meningkatkan intensitas Rapat Koordinasi yang berimbang agar dapat menghasilkan kebijakan yang tepat guna dan tepat biaya.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Keterjangkauan Harga dan Ketersediaan Stok

TPID tetap berupaya melakukan analisa terhadap adanya potensi tekanan harga dan stok barang melalui aktivitas pemantauan harga dan stok barang beredar serta memastikan ketersediaan barang dan tidak terjadinya kelangkaan komoditas di Kepulauan Anambas.

2. Ketersediaan Pasokan/Produk

TPID secara konsisten tetap mendorong dan mengawal program-program non-moneter seperti menaikkan hasil produksi komoditas pangan lokal di daerah agar dapat mencukupi kuota kebutuhan lokal dan melakukan pengawasan harga dan distribusi barang beredar secara berkelanjutan.

3. Kelancaran Distribusi

3.

TPID secara berkesinambungan tetap mengawal program **“Peningkatan Sistem Logistik secara Terintegrasi pengalihan lokus Pelabuhan ke Area Logistik Teluk Ret”**.

Pengalihan dilakukan secara parsial dengan penggunaan logistik dan pemanfaatan sisi Pelabuhan Teluk Ret untuk transportasi antar pulau. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat memaksimalkan perannya dalam memberikan pembinaan yang lebih intensif dengan penyertaan modal dana desa, pendampingan pelatihan pengelolaan keuangan yang berbasis aplikasi serta mendorong perencanaan bantuan stimulus fiskal untuk BUMDES yang dinilai berhasil dan layak dalam operasional BUMDES.

4. Komunikasi Efektif

TPID melaksanakan fungsi koordinatif melalui Bagian Perekonomian SDA dan Inpektorat Daerah untuk mendapatkan seluruh data dukung dan informasi kegiatan/program yang berkaitan dengan TPID. Seluruh data dan informasi agar dapat dituangkan dalam suatu Laporan Pelaksanaan Tugas sesuai dengan arahan Kemendagri tentang Tim Penanganan Inflasi Daerah.